

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi dari Politik Luar Negeri Feminis Swedia tahun 2014 hingga tahun 2017. Pada saat ini, berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan masih banyak terjadi di berbagai belahan dunia, meskipun saat ini sudah memasuki era globalisasi. Isu feminisme sendiri yang memperjuangkan hak perempuan dalam berbagai sektor telah berkembang sejak berabad-abad dahulu tepatnya sejak akhir abad ke-18. Akan tetapi, meski sudah berkembang sejak lama dan berbagai gerakan muncul untuk menjunjung tinggi kesetaraan terhadap perempuan dan laki-laki, nyatanya perjuangan tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Kenyataannya, masih banyaknya bentuk diskriminasi terhadap perempuan, misalnya dalam bidang politik dimana masih banyak sekali representasi perempuan yang sangat rendah dalam politik. Bahkan berdasarkan data dari Bank Dunia dari tahun 2000-2014 angka representasi perempuan secara global dalam parlemen masih disekitaran angka 20%, yang artinya masih sangat jauh dari setara dengan laki-laki.

Padahal, perempuan memiliki andil yang cukup besar dalam proses perdamaian. Namun nyatanya, perempuan masih jarang sekali dilibatkan dalam proses perdamaian, seperti negosiasi maupun mediasi. Rendahnya peran perempuan dalam politik justru semakin sulitnya perdamaian untuk dicapai karena dalam pengambilan keputusan, sangat diperlukan adanya partisipasi perempuan agar karena keputusan yang akan diambil juga berdampak pada perempuan. Itu mengapa, partisipasi dan representasi perempuan dalam ranah politik sangat diperlukan. Selain itu, diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang ekonomi khususnya

pekerjaan juga menimbulkan angka kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan data riset dari UN Women, secara umum perempuan dari 89 negara 4% cenderung lebih miskin dari pada laki-laki. Berbagai stereotip mengenai perempuan dan isu domestik serta diskriminasi akibat perempuan tersubordinasi dari laki-laki, terkadang membuat perempuan lebih memilih untuk tinggal di rumah. Selain isu kesenjangan dalam ekonomi, kesenjangan dalam pendidikanpun juga masih banyak terjadi dikarenakan stereotip yang sama mengenai perempuan.

Kesenjangan yang terjadi dalam berbagai sektor ini terjadi diberbagai negara tanpa terkecuali negara maju sekalipun. Swedia sebagai negara pertama yang menyatakan dirinya sebagai negara feminis pertama didunia pada tahun 2014, juga menerapkan politik luar negeri feminis yang menunjukkan tekad kuatnya untuk memberantas ketidaksetaraan gender. Dengan di rilisnya politik luar negeri feminis pada tahun yang sama pula, menunjukkan bahwa Swedia dalam menjalankan politik luar negerinya akan berprinsip pada nilai kesetaraan gender.

Didukung dengan Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga selalu berupaya untuk mewujudkan kesetaraan gender, yang dibuktikan dengan PBB mengeluarkan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* dan mengadakan *World Conference on Women (WCW)* yang diadakan tahunan. Serta Uni Eropa yang sudah sejak lama menjadikan kesetaraan gender sebagai prinsip, yaitu tepatnya sejak Perjanjian Roma. Hal ini membuktikan bahwa, kedua organisasi besar dunia itu berusaha untuk terus mencapai kesetaraan gender demi mencapai perdamaian dunia. Dengan begitu, Swedia sebagai negara yang bergabung dengan kedua organisasi tersebut tentunya mendukung penuh upaya kedua OI tersebut.

Untuk mengurangi angka kesenjangan gender yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, melalui politik luar negeri feminisnya, Swedia sebagai negara feminis

menjalankan politik luar negerinya dengan menggunakan strategi *gender mainstreaming*, dimana dalam setiap tindakan dan keputusan yang dilakukannya selalu berpegang pada prinsip gender dan menggunakan *soft power* nya dalam mempengaruhi negara lain agar melakukan apa yang diharapkan Swedia, dalam kasus ini adalah perihal kesetaraan gender dalam politik. Implementasi politik luar negeri feminis Swedia diantaranya dengan berkontribusi dalam meningkatkan representasi perempuan dalam politik di negara-negara berkembang melalui kinerja Kedutaan Besar Swedia yang berada di negara tersebut. Berdasarkan laporan tiga tahun kinerja politik luar negeri feminis Swedia, pemerintah Swedia telah berkontribusi cukup besar dalam peningkatan representasi perempuan di Somalia dan Moldova melalui *soft power*nya. Di Somalia, Kedutaan Besar Swedia mengadakan berbagai bentuk diskusi dengan pemerintah pusat Somalia dan NGO di negara tersebut untuk mengadvokasikan prinsip kesetaraan gender. Dengan seringnya diadakan diskusi, membuahkan hasil yaitu meningkatnya presentase perempuan dalam parlemen Somali padapemilu 2016, dimana naik sebesar 10%, dari 14% menjadi 24%. Walaupun sudah mengalami peningkatan 10% namun hal tersebut masih belum mencapai target 30% sehingga berbagai pertemuan dan kerjasama masih terus diusahakan oleh Kedutaan Besar Swedia untuk mencapai target ambisius tersebut. Sedangkan untuk Moldova, Kedutaan Besar Swedia bekerja sama dengan UN Women Moldova dalam mengadvokasikan kesetaraan gender dengan memberikan bantuan financial juga. Selain itu, melalui program Women in Politics (WiP), Swedia banyak berkontribusi dengan hasil pada tahun 2016 Moldova mengadopsi UU yang menetapkan bahwa daftar partai sehubungan dengan pemilihan parlemen, pemerintah, secretariat parlemen dan lembaga negara lainnya harus memasukkan setidaknya 40% perempuan dalam posisi yang dapat dipilih. Selain itu, pada tanggal 19 September 2016, Pemerintah Swedia, diwakili oleh Kedutaan Besar Swedia di Moldova, dan UN Women Moldova, Badan PBB untuk

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, telah menandatangani perjanjian baru untuk periode 2016-2020. Kesepakatan ini mendukung implementasi Nota Strategi Perempuan PBB untuk Moldova yang bertujuan untuk terus memberdayakan perempuan di Moldova, terutama kelompok yang paling rentan. Kontribusi finansial Swedia untuk Moldova melalui UN Women juga mencapai total adalah sekitar 20 Juta Krona Swedia atau sekitar 2,36 juta Dolar AS. Dengan dukungan Swedia, UN Women Moldova akan terus memimpin pendekatan inovatifnya untuk memecahkan ketidaksetaraan di negara tersebut.

Implementasi lainnya dari politik luar negeri Swedia adalah aktifnya Swedia dalam mendukung isu kesetaraan gender dalam forum internasional. UE dan PBB sebagai salah satu organisasi terbesar di dunia dan yang cukup gencar dalam mempromosikan isu kesetaraan gender, maka Swedia sebagai negara anggota kedua organisasi besar tersebut sangat mendukung berbagai tindakan yang dilakukan oleh UE dan PBB untuk mencapai kesetaraan gender. Selain itu juga karena isu yang diangkat oleh kedua organisasi besar tersebut juga sangat sesuai dengan ideologi feminisme yang dianut oleh Swedia.

Sebagai negara anggota tetap dan aktif UE, Swedia berperan cukup besar dalam menjalankan strategi-strategi kesetaraan gender UE. Selain itu melalui keanggotaannya di Dewan Eropa, Swedia berpartisipasi aktif dalam Komisi Kesetaraan Gender dan berbagi pengalamannya kepada negara-negara anggota lainnya sebagai negara anggota yang telah menerapkan strategi Dewan Uni Eropa perihal kesetaraan gender. Strategi Uni Eropa perihal gender misalnya Strategy for Equality tahun 2010-2015 yang dilanjutkan untuk tahun 2016-2019 serta Gender Action Plan 2016-2020. Dengan adanya strategi strategi UE ini, Swedia sebagai negara anggota tetap dan aktif Swedia juga berkontribusi secara finansial untuk pelaksanaan rencana aksi Dewan Eropa bagi berbagai negara anggota. Selain itu, seorang ahli Swedia telah melatih tim pengarusutamaan

gender. Swedia juga telah melakukan kampanye yang sukses agar seorang ahli gender Swedia terpilih dalam *The Council of Europe's Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings* (GRETA), yang bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan Konvensi Dewan tentang Aksi Melawan Perdagangan Manusia. Swedia menekan Komisi Eropa untuk menjadi pendukung SRHR yang lebih kuat dan sertakan SRHR dalam laporan tahunan Komisi tentang pelaksanaan Rencana Aksi Uni Eropa tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam hubungan eksternal UE. Swedia juga merupakan kekuatan pendorong perihal SRHR dalam Dewan UE tentang kesetaraan gender dalam kerja sama pembangunan sejak Mei 2015 dan terus mengejar masalah ini dalam kinerja kebijakan pembangunan baru Uni Eropa. Serta dalam Istanbul Convention (Konvensi Istanbul) yang diadakan tahun 2011 namun mulai dilaksanakan sejak 2014, Swedia mendorong negara-negara Uni Eropa dan negara lainnya untuk mengimplementasikan "The Council of Europe Convention" dalam usaha untuk mencegah dan memerangi kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan kosmetik.

Melalui PBB, sebagai anggota aktif, Swedia juga banyak mendukung berbagai kegiatan badan-badan PBB guna mencapai kesetaraan gender. Dukungan Swedia terlihat dari bantuan-bantuan finansial yang rutin yang diberikan oleh Swedia. Swedia yang memainkan peran sentral sebagai yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasi badan-badan PBB dalam kinerjanya perihal kesetaraan gender dan sebagai kunci dalam usaha-usaha mencapai kesetaraan gender di PBB. Bantuan inti Swedia kepada badan-badan khusus PBB sebagai bentuk tanggungjawab dan kinerja Swedia dalam mendukung dan mempromosikan isu kesehatan dan hak reproduksi dan seksual serta isu yang berfokus pada isu perempuan serta kesetaraan gender. Selain bantuan finansial dalam mendukung kinerja PBB, Swedia sebagai negara feminis juga seringkali mendorong negara-negara anggota untuk meningkatkan

komitmen mencapai kesetaraan gender dalam berbagai forum dialog yang diadakan oleh PBB.

Implementasi yang terakhir adalah kebijakan dalam bidang kemanusiaan, dimana Swedia menerapkan Gender Marker. *Gender Marker* sendiri yaitu alat yang mengkode pada skala 0-3, apakah proyek kemanusiaan dirancang dengan cukup baik untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki akan mendapatkan manfaat yang sama dari bantuan kemanusiaan yang diberikan dan memastikan apakah bantuan itu akan memajukan kesetaraan gender. Jika proyek memiliki potensi untuk berkontribusi pada kesetaraan gender, maka penanda memprediksi apakah hasilnya mungkin akan terbatas atau signifikan. Gender marker ini dapat digunakan oleh tim desain proyek untuk menilai dan memperkuat potensi kesetaraan gender dari proyek-proyek dalam setiap mekanisme bantuan kemanusiaan atau pendanaan yang diberikan.